

Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Mengembangkan Sarana dan Prasarana di Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Jakarta Selatan

Haniatul Khoiriyah* & Sita Ratnaningsih

Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: haniatoel332@gmail.com

Article History

Received: December 07th, 2023

Revised: January 21th, 2024

Accepted: February 14th, 2024

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana penerapan manajemen keuangan pendidikan yang berkontribusi pada pengembangan sarana dan prasarana di Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas. Studi ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode deksriptif. Subjek utama penelitian ini adalah kepala sekolah. Dalam penelitian ini, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan pembiayaan di MTs Al-Ikhlas dilakukan dengan rapat bersama para *stakeholders* dengan mempertimbangkan ketersediaan dana, hasil evaluasi sarana-prasarana, dan skala prioritas. Penyusunan RAPBM melibatkan identifikasi sumber dana dan evaluasi keuangan untuk menentukan prioritas pemenuhan sarana dan prasarana. Penetapan anggaran pengembangan sarana prasarana di MTs Al-Ikhlas dengan menguraikan per item dalam kesepakatan bersama antara yayasan, sekolah, dan komite. Pertanggungjawaban pengembangan sarana dan prasarana di MTs Al-Ikhlas dilakukan secara per bulan dan per semester, mencakup sumber dana dari SPP dan BOS. Laporan keuangan yang diserahkan kepada pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Badan Administrasi Keuangan Daerah, sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Keywords: Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Madrasah

PENDAHULUAN

Sarana prasarana yang memadai merupakan sumber daya yang perlu dimiliki oleh suatu satuan lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas (Ellong, 2017). Kekurangan sumber daya keuangan akan mempengaruhi sarana dan prasarana madrasah dalam mendukung proses pendidikan. Ketercapaian program pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah serta bagaimana mereka digunakan seoptimal mungkin (Ainiyah & Husnaini, 2019). Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan pendidikan sangat krusial dalam proses pendidikan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya (Herman & Riady, 2018). Manajemen pembiayaan memberikan perhatian yang besar dalam pentingnya tata kelola keuangan pendidikan dalam meningkatkan program madrasah, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, dan pelaksanaan akademis lainnya (Pusvitasari & Sukur, 2020).

Pengelolaan pembiayaan pendidikan memainkan sejumlah langkah penting dalam

implementasinya. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, pengawasan, dan pengendalian merupakan komponen kunci dari manajemen pembiayaan yang efektif. Pengelolaan pembiayaan sangat erat kaitannya dengan semua operasional madrasah, maka dari itu pengelolaan pembiayaan merupakan hal mendasar yang perlu diperhatikan oleh setiap lembaga pendidikan (Surur & Sanjaya, 2022). Pengelolaan pembiayaan pendidikan tidak hanya mengevaluasi sumber dana yang tersedia, tetapi juga mencakup pengoptimalan penggunaan dana tersebut. Semakin efisien pengelolaan pembiayaan pendidikan yang diimplementasikan, semakin efisien biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan (Sembiring & Prana, 2023).

Salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan, terletak pada kemampuan SDM dalam mengelola dana yang tersedia dengan mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas program pembangunan pendidikan dari tahun ke tahun secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan

perencanaan program (Sukma & Nasution, 2022). Pengelolaan pembiayaan pendidikan memiliki beberapa prinsip yang perlu diperhatikan seperti efektif, efisien, akuntabilitas publik, dan transparansi diperlukan dalam manajemen keuangan pendidikan (Fatra & Harapan, 2017).

Kepala sekolah sebagai perencana anggaran sekolah, harus memahami manajemen keuangan sekolah, terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan semua kebutuhan sekolah (Myende et al., 2018). Manajemen keuangan sekolah sangat penting dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan sekolah (Said, 2018). Seorang kepala sekolah harus memiliki ilmu pengetahuan tentang manajemen, khususnya manajemen keuangan, karena untuk menjalankan seluruh kegiatan yang ada di sekolah tidak terlepas dari pengolahan dana. Dana yang diperoleh atau diberikan oleh pemerintah, maupun pihak lainnya memerlukan manajemen yang baik (Rangongo et al., 2016). Sebesar apapun dana sekolah bila tidak dikelola dengan manajemen yang baik, maka sekolah tersebut akan mengalami suatu kemunduran. Untuk membantu dalam masalah pembayaran operasional sekolah, pemerintah memberikan dana yang disebut dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Widyatmoko & Suyatmini, 2017). BOS diberikan bagi satuan pendidikan di lembaga sekolah/madrasah untuk membantu pembiayaan salah satunya dalam menunjang sarana prasarana pendidikan, pemeliharaan dan perbaikan sekolah (Pusvitasari & Sukur, 2020).

Sarana prasarana yang digunakan dalam menunjang pengelolaan kegiatan belajar mengajar harus memenuhi syarat, agar tujuan pendidikan dapat tercapai (Rismayani et al., 2021). Tanpa adanya sarana prasarana yang memadai pendidikan tidak dapat berjalan secara optimal. Sarana dan prasarana pendidikan perlu dikelola dengan baik serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen pendidikan (Nurhadi et al., 2018). Seperti gedung, tanah, perlengkapan administrasi sampai pada sarana yang digunakan langsung dalam kegiatan belajar mengajar di kelas yang dapat membantu mempermudah pemahaman peserta didik dalam proses kegiatan pembelajaran di sekolah sehingga lebih bermakna, berkualitas, dan menyenangkan. Tanpa adanya sarana prasarana pendidikan, maka proses pembelajaran akan terhambat dan

berpengaruh pada hasil belajar peserta didik (Pusvitasari & Sukur, 2020).

Dalam memperoleh dana guna memenuhi berbagai kebutuhannya, sekolah perlu bekerjasama dalam mendapatkan dukungan dana dengan berbagai pihak baik wali murid, komite sekolah maupun pemerintah (Hardiansyah, 2017). Dalam pengelolaan pembiayaan sekolah perlu melibatkan *stakeholders* internal maupun eksternal untuk mengawal sistem keuangan yang ada. Melalui pelibatan tersebut, diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola sistem keuangan sekolah, mulai dari partisipasi, pemenuhan kebutuhan sekolah, sampai pada pengawasannya (Zahrudin et al., 2019). Dalam penelitian ini peneliti mencoba menganalisis pengelolaan pembiayaan madrasah yang diimplementasikan di Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Jakarta Selatan dalam rangka mengembangkan sarana dan prasarana pendidikannya dalam menunjang proses pendidikan peserta didiknya. Sebagai lembaga pendidikan swasta, pengelolaan pembiayaan madrasah dalam pemenuhan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan menjadi tantangan tersendiri bagi Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas, terlebih Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas terletak di tengah-tengah kota Jakarta Selatan yang tentu secara langsung akan bersaing dengan sekolah lain dalam hal kualitas pemenuhan dan pengembangan sarana prasarana sekolah.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Al-Ikhlas yang berlokasi di Jl. Kemandoran 2 Nomor 28 Kebayoran lama, Jakarta Selatan. Metode penelitian ini berjenis kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena pada subyek penelitian dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dengan uraian dan metode-metode yang alamiah. Disebut penelitian kualitatif dikarenakan penelitian yang dilakukan menggunakan data kualitatif sehingga analisisnya juga menggunakan analisis kualitatif atau dengan cara menggambarkan temuan lapangan yang bersifat naturalistic (Kurniawan, 2018). Dalam penelitian ini penulis mencoba mendeskripsikan temuan-temuan data di lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai pengelolaan pembiayaan pendidikan yang

diimplementasikan Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlash dalam rangka mengembangkan sarana prasarana madrasah kemudian peneliti menganalisis temuan data di lapangan dengan teori-teori dan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui analisis data kualitatif secara berkelanjutan dan induktif yang terdiri dari mereduksi data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan (Kurniawan, 2018). Validitas data dilakukan dengan observasi yang terus menerus dan triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan pada berbagai waktu (Helaluddin & Wijaya, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pembiayaan Pengembangan Sarana dan Prasarana

Newman dalam Taufiqurokman (2008) mengemukakan bahwa perencanaan merupakan suatu pengambilan keputusan awal mengenai apa yang hendak dikerjakan. Perencanaan mengandung rangkaian-rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan dari tujuan, penentuan program, penentuan kebijakan, prosedur tertentu, dan penentuan metode, serta penentuan kegiatan (Suryapermana, 2017).

Perencanaan keuangan sekolah adalah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di Sekolah. Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan berhubungan dengan anggaran atau budget, sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap tahun (Masbullah et al., 2023). Berdasarkan hasil penelitian, dalam membahas perencanaan pembiayaan, MTs Al-Ikhlash melaksanakan rapat kerja diawal atau di sebut dengan pra-raker kegiatan tersebut dimulai pada bulan Juli yang membahas mengenai kepanitiaan program kerja pra-raker, kemudian di akhir Mei itu kita membuat kegiatan-kegiatan raker (rapat kerja) dalam rapat tersebut membahas apa saja kegiatan yang ingin dilaksanakan, tentunya yang akan dilaksanakan pada tahun pembelajaran berikutnya, prosesnya dibuat dalam dua komisi yaitu komisi akademik dan non akademik dari akademik yaitu ada waka kurikulum dan ada waka kesiswaan non akademik.

Proses perencanaan anggaran untuk sarana prasarana di MTs Al-Ikhlash diawali dengan rapat bersama yang melibatkan seluruh *stakeholders* MTs Al-Ikhlash seperti Kepala Yayasan, Kepala Madrasah, kepala komite madrasah, para tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan terkait dengan perencanaan kebutuhan sarana dalam satu tahun ajaran. Dalam mengidentifikasi perencanaan pengadaan sarana prasarana MTs Al-Ikhlash mempertimbangkan beberapa hal seperti ketersediaan dana, hasil evaluasi sarana dan prasarana yang ada, dan pertimbangan skala prioritas sarana prasarana. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh (Saway & Hidayat, 2019) bahwa dalam mengidentifikasi perencanaan pengadaan sarana prasarana madrasah perlu memperhatikan besar dana yang dimiliki, apa saja sarana-prasarana yang perlu untuk disediakan, dan sarana-prasarana apa saja yang masih tersisa dan layak pakai.

Kemudian menyusun pengadaan sarana prasarana dengan mengimplementasikan rencana melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sebelum menyusun RAPBM (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah) para *stakeholders* mengidentifikasi sumber dana bagi sekolah sebelum menyusun RAPBS. Dari mana saja masukannya dan kemudian untuk apa pengeluarannya. Hal itu dilakukan untuk mengevaluasi kondisi keuangan, mulai menentukan skala prioritas yang harus dipenuhi oleh sekolah, khususnya pemenuhan sarana dan prasarana.

Penetapan Anggaran Pengembangan Sarana dan Prasarana

Dalam menetapkan anggaran perencanaan untuk biaya sarana prasarana, sekolah perlu menguraikan per item sarana prasarana dengan pihak yayasan, sekolah, dan komite yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama (Pusvitasari & Sukur, 2020). Berdasarkan hasil penelitian, dalam mengembangkan sarana dan prasarana MTs Al ikhlash, kepala madrasah mensuunnya dalam rapat kerja awal. Kemudian setelah itu menentukan kegiatan-kegiatan pengembangan sarana prasarana melalui proposal yang disampaikan kepada komite madrasah, pihak yayasan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Seperti pada pengembangan sarana-prasarana yang baru saja dilakukan yaitu pembangunan gedung baru, Kepala madrasah MTs Al-Ikhlash menyusun perencanaan anggaran

kemudian diajukan kepada yayasan setelah itu mengajukan ke penerbit sebagai mitra kerja sama, dan juga para alumni.

Selanjutnya untuk alokasi dana sarana dan prasarana di MTs Al-Ikhlas berasal dari dua sumber, pertama bersumber dari SPP yang kedua bersumber dari bantuan pemerintah berupa BOS. Untuk SPP yang diambil perbulan dari siswanya itu kita hanya bisa ambil sekitar 20 sampai 30 persen maksimal saja untuk sarana. Adapun untuk BOS itu hampir 50 persen maksimal, tapi realisasinya sekitar 30 sampai 40 persen untuk sarana dan prasarana. Kemudian lain-lainnya lagi kalau ada pembangunan nominalnya besar, seperti yang utama bangunan ruang, biasanya mendapatkan bantuan donasi dari yayasan, yang mengeluarkan kebijakan bersumber dari saldo PPDB itu sendiri. kemudian untuk pemeliharaan minor sarana dan prasarana setiap semester di bawah Rp.10.000.000 itu dianggarkan dari SPP dan dana BOS, hal ini sebagaimana yang dinyatakan Pusvitasari dan Sukur (2020) bahwa Setiap semester tentu ada pengecekan barang yang masih bisa dipakai dan tidak layak pakai sehingga akan ada pengadaan sarana yang sudah habis atau tidak layak pakai. Begitupun dengan prasarana apabila ada kerusakan tentu perlu dilakukan perbaikan

Perkembangan fasilitas sarana prasarana di MTs Al-Ikhlas sudah hampir memadai, hal ini buah dari pihak madrasah yang terus berupaya semaksimal mungkin dalam mengembangkannya. Hingga saat ini MTs Al-Ikhlas memiliki ruangan-ruangan yang sekolah lain masih kesulitan untuk memilikinya seperti kelengkapan ruangan laboratorium dan peralatannya; MTs Al-Ikhlas memiliki laboratorium IPA, laboratorium bahasa, dan laboratorium computer, serta mushola.

Pertanggung jawaban Pengembangan Sarana dan Prasarana.

Pertanggungjawaban atau Akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat diperlukan dalam setiap organisasi dan lembaga yang semua aktivitasnya dituntut untuk selalu akuntabel (Hidayatullah et al., 2019). Mardiasmo dalam Karimah dan Baehaqi (2022) menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu jalan agar pihak yang diberikan wewenang bertanggungjawab atas yang dikerjakannya atau membawanya untuk menjadi perhatian publik dan dilakukan secara berkala. Akuntabilitas

secara filosofis disebut mandat atau amanah (Muddatstsir & Sawarjuwono, 2018).

Pelaksanaan pertanggungjawaban untuk pengembangan sarana dan prasarana dilaksanakan dalam bentuk laporan bulanan dan persemester. Pelaporan pertanggungjawaban dana yang berasal dari SPP. Kemudian untuk dana bantuan seperti BOS pertanggungjawabannya dilaksanakan persemester dari pertahun anggaran dari bulan Januari sampai bulan Juni untuk pertengahan semester dan bulan Juli hingga bulan Desember untuk akhir semester. Laporan keuangan berisikan tentang pemasukan, pengeluaran dan pemakaian biaya. Laporan pertanggung jawaban tersebut nantinya diserahkan kepada pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan dan Badan Administrasi keuangan Daerah. Pelaksanaan pertanggung jawaban di MTs Al-Ikhlas ini sudah sesuai dengan Suradji (2018) yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan keuangan sekolah dilaksanakan dalam bentuk laporan bulanan dan triwulan kepada 1) Kepala dinas pendidikan, 2) Kepala badan administrasi keuangan daerah (BAKD), dan 3) Kantor dinas pendidikan.

KESIMPULAN

Perencanaan pembiayaan di MTs Al-Ikhlas melibatkan rapat kerja pada bulan Juli dan rapat kerja (raker) pada akhir Mei. Prosesnya terbagi dalam dua komisi, yakni komisi akademik dan non-akademik, yang membahas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pembelajaran berikutnya. Untuk pengadaan sarana prasarana, dilakukan rapat bersama *stakeholders* dengan mempertimbangkan ketersediaan dana, hasil evaluasi sarana-prasarana, dan skala prioritas. Penyusunan RAPBM melibatkan identifikasi sumber dana dan evaluasi keuangan untuk menentukan prioritas pemenuhan sarana dan prasarana. Penetapan anggaran pengembangan sarana prasarana di MTs Al-Ikhlas melibatkan penguraian per item dalam kesepakatan bersama antara yayasan, sekolah, dan komite. Prosesnya dimulai dengan kepala madrasah menyusunnya dalam rapat kerja awal, menentukan kegiatan pengembangan melalui proposal, dan mengajukan anggaran kepada yayasan, penerbit sebagai mitra kerja sama, dan alumni, terutama dalam konteks pembangunan gedung baru. Pertanggungjawaban pengembangan sarana dan

prasarana di MTs Al-Ikhlas ditekankan sebagai aspek penting dalam setiap organisasi pendidikan. Pelaporan dilakukan secara bulanan dan persemester, mencakup sumber dana dari SPP dan BOS. Laporan keuangan yang diserahkan kepada pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Badan Administrasi Keuangan Daerah, sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah

REFERENSI

- Ainiyah, Q., & Husnaini, K. (2019). Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran di SMAN Bareng Jombang. *Al-Idaroh*, 3(2), 98–112. <https://doi.org/10.54437/alidaroh.v3i1.93>
- Ellong, T. D. A. (2017). Manajemen Sarana dan Prasarana di Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Iqra*, 11(1), 1–8. <https://doi.org/10.30984/jii.v11i1.574>
- Fatra, & Harapan, E. (2017). Implementasi Prinsip dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Palembang. *JMKSP: Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan*, 2(1), 46–54. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v2i1.1153>
- Hardiansyah. (2017). Studi Kritis Peran Komite Sekolah di MTs Nurul Ikhsan. *Jurnal Paedagogy*, 4(2), 37–41. <https://doi.org/10.33394/jp.v4i2.3023>
- Helaluddin, & Wijaya, H. (2018). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Herman, & Riady, A. (2018). Survey Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani di SMP/MTS Swasta Kabupaten Pangkep. *Sportive: Journal of Physical Education, Sport and Recreation*, 1(3), 27–35. <https://doi.org/10.26858/sportive.v1i2.5624>
- Hidayatullah, A., Sulistiyo, A. B., & Hisamudin, N. (2019). Analisis Rekonstruksi Penyusunan Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus pada Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 6(1), 69–75. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v6i1.11102>
- Karimah, H., & Baehaqi, A. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Manajemen Keuangan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi. *JIAI: Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.32528/jiai.v7i1.6898>
- Kurniawan, A. (2018). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Masbullah, AS, A. Bin, Mudzafaroh, N., Hariyadi, A., & Nurdiana, D. D. (2023). Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Pendidikan. *Al-Mada: Jurnal Agama Sosiasal Dan Budaya*, 6(1), 92–101. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i1.2894>
- Muddatstsir, U. D. Al, & Sawarjuwono, T. (2018). The Way to Build a Mosque Accountability. *JCAE Symposium 2018 – Journal of Contemporary Accounting and Economics Symposium 2018 on Special Session for Indonesian Study*, 793–801. <https://doi.org/10.5220/0007021407930801>
- Myende, P. E., Samuel, M., & Pillay, A. (2018). Novice Rural Principals' Successful Leadership Practices in Financial Management: Multiple Accountabilities. *South African Journal of Education*, 38(2), 1–11. <https://doi.org/10.15700/saje.v38n2a1447>
- Nurhadi, I., Subiyantoro, H., & Hadi, N. U. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren untuk Meningkatkan Minat Masyarakat: Studi Kasus Pemberdayaan Santri Pondok Pesantren Nurul Ulum. *Al-Idarah*, 8 (1).
- Pusvitasari, R., & Sukur, M. (2020). Manajemen Keuangan Sekolah dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan (Studi kasus di SD Muhammadiyah 1 Krian, Sidoarjo). *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 04(01), 94–106. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i1.959>
- Rangongo, P., Mohlakwana, M., & Beckmann, J. (2016). Causes of Financial Mismanagement in South African Public Schools: The Views of Role Players. *South African Journal of Education*, 36(3), 1–10. <https://doi.org/10.15700/saje.v36n3a1266>
- Rismayani, Lestari, E. A., & Tarigan, N. N. U. B. (2021). Problematika Sarana dan Prasarana Pendidikan Rismayani. *Al-*

- Ulum: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 136–149. <https://doi.org/10.56114/al-ulum.v2i2.119>
- Said, A. (2018). Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Melestarikan Budaya Mutu Sekolah. *EVALUASI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 257–273. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v2i1.77>
- Saway, M. H. M., & Hidayat, A. (2019). Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Madrasah Aliyah di Kabupaten Bandung. *Manazhim: Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 1(2), 130–141. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v1i2.217>
- Sembiring, H. A. Z., & Prana, R. R. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Guna Menilai Kinerja Keuangan Sekolah Dasar. *EKUITAS: Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah*, 5(1), 233–241. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i1.3673>
- Sukma, A. H. B., & Nasution, A. M. (2022). Manajemen Keuangan Sekolah dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan di Bekasi. *Ál-Fâhim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 45–57. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v4i1.226>
- Suradji, M. (2018). Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Bidang Kesiswaan, Kepegawaian dan Keuangan di SMA Muhammadiyah 1 Gresik. *TALIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 1(2), 127–151. <https://doi.org/10.52166/talim.v1i2.957>
- Surur, A. M., & Sanjaya, M. (2022). Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan TPQ Roudlotut Tholab. *Al-Fikru: Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.55210/alfikru.v3i1.770>
- Suryapermana, N. (2017). Manajemen Perencanaan Pembelajaran. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 3(02), 183–193. <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v3i02.1788>
- Taufiqurokhman (2008). *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Widyatmoko, S., & Suyatmini. (2017). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN Kemasan I Surakarta. *Manajemen Pendidikan*, 2(1), 153–160. <https://doi.org/10.23917/jmp.v12i3.5528>
- Zahrudin, Arifin, Z., & Suhandi, A. (2019). Implementasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 26(1), 45–56. <https://doi.org/10.17509/jap.v26i1.19847>